

Studi Perbandingan Hukum Legalitas Perjudian di Indonesia dan Filipina

Miska Yusri Sulthanah¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: miskayusri@student.uns.ac.id

Abstrak: Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur perjudian. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan regulasi perjudian di Indonesia dan Filipina guna memahami pola pengaturan yang diterapkan di kedua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, perjudian sepenuhnya ilegal dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Sementara itu, di Filipina perjudian berbasis darat adalah legal selama memiliki lisensi resmi dari otoritas yang berwenang, sedangkan perjudian online hanya legal untuk warga negara asing dan entitas yang berlisensi, tetapi tetap ilegal bagi warga Filipina. Namun, per 1 Januari 2025, perjudian online di Filipina sepenuhnya menjadi ilegal.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum; Perjudian; Perjudian *Online*; Indonesia; Filipina

Abstract: Every country adopts a distinct approach to gambling regulation. This study seeks to analyze and compare the legal frameworks governing gambling in Indonesia and the Philippines to identify the regulatory models applied in each jurisdiction. Utilizing a normative juridical method with a comparative law approach, the research findings reveal that gambling is entirely prohibited and criminalized in Indonesia. In contrast, in the Philippines, land-based gambling is legal, provided it is licensed by the relevant authorities, whereas online gambling is permitted only for foreign nationals and licensed entities, but remains illegal for Filipino citizens. However, effective January 1, 2025, online gambling will be completely prohibited in the Philippines.

Keywords: Legal Comparison; Gambling; Online Gambling; Indonesia; Philippines

1. Pendahuluan

Perjudian merupakan suatu fenomena sosial yang telah berkembang sejak zaman dahulu, melibatkan unsur taruhan atau spekulasi untuk memperoleh keuntungan (Ruslan et al., 2021: 29). Jenis perjudian sangat beragam, meliputi perjudian kasino (*black jack, baccarat, creps, keno, tombola, super pingpong, lotto fair, pauk yu*, dan lain-lain), perjudian di keramaian (pacuan kuda, pacuan anjing, *hailai*, karapan sapi, erek-erek, dan lain-lain), perjudian *online*, dan permainan tradisional seperti judi dadu dan sabung ayam (Abeth et al., 2021: 95).

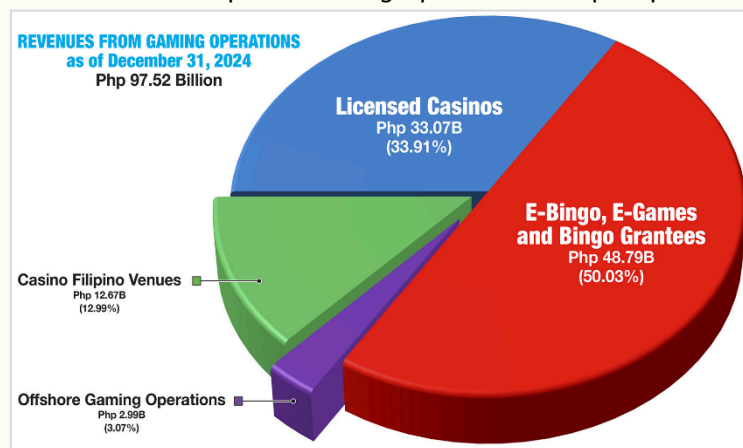
Dari segi ekonomi, perjudian dapat memberikan potensi pendapatan yang besar melalui pajak, penciptaan lapangan kerja, investasi, dan kontribusi pada

sektor pariwisata. Pajak yang diperoleh dari perjudian dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan dan fasilitas publik, terutama di daerah yang secara langsung terdampak negatif oleh aktivitas perjudian (Lewiandy et al., 2024: 15). Namun, di sisi lain, terdapat dampak negatif dari perjudian tidak dapat diabaikan, seperti peningkatan utang pribadi, kecanduan judi, munculnya bentuk kejahatan lain seperti pencurian, praktik jual beli rekening bank pribadi, penipuan, pencucian uang, hingga masalah sosial lainnya yang berpotensi merusak tatanan masyarakat (Setiawati et al., 2022: 112–113). Oleh sebab itu, regulasi yang jelas dan tegas mengenai perjudian menjadi salah satu aspek penting untuk mencegah dan menekan dampak negatif yang dapat ditimbulkan.

Setiap negara memiliki pendekatan berbeda dalam mengatur perjudian, yang umumnya terbagi dalam kriminalisasi dan dekriminalisasi. Kriminalisasi diterapkan karena perjudian dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap berbagai aspek, sehingga negara memberlakukan sanksi pidana untuk membatasi dan mencegah perjudian guna menjaga ketertiban sosial. Sebaliknya, dekriminalisasi memungkinkan perjudian dalam batasan hukum tertentu melalui mekanisme perizinan dan pengawasan ketat. Pendekatan ini diterapkan dengan tujuan mengontrol aktivitas perjudian agar tetap berada dalam koridor hukum serta memberikan manfaat ekonomi bagi negara.

Di Indonesia, pemerintah secara aktif melakukan pemberantasan terhadap aktivitas perjudian. Dalam upaya menanggulangi maraknya perjudian *online*, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bekerja sama dengan aparat penegak hukum secara rutin memblokir situs dan aplikasi perjudian *online*. Sejak periode 2017 hingga 12 November 2024, Kemkomdigi telah menangani sebanyak 5.156.452 konten yang terkait dengan aktivitas perjudian (Wisnubroto, 2024).

Gambar 1. Total Pendapatan *Gaming Operation* di Filipina periode 2024



Sumber: PACGOR.ph, 2025.

Sementara itu, di Filipina, industri kasino dan perjudian merupakan salah satu kontributor dan penggerak bagi pertumbuhan ekonomi (Philippines Anti-Money Laundering Council, 2020: 3). Perjudian di negara ini diatur dan diawasi oleh *Philippine Amusement and Gaming Corporation* (PAGCOR), sebuah perusahaan

milik negara yang bertanggung jawab atas regulasi dan operasional perjudian legal (Prasetyawati & Lamoste, 2021: 151). Pada tahun 2024, berdasarkan data yang dilansir dari situs *pacgor.ph*, PAGCOR mencatat pendapatan sebesar ₱112 miliar, meningkat 41% dari tahun sebelumnya (₱79 miliar pada 2023). Pendapatan operasional bersih mencapai ₱84,97 miliar (+51%), dengan laba bersih ₱16,77 miliar setelah kontribusi ₱68,21 miliar untuk pembangunan nasional (PACGOR, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas perbandingan hukum mengenai legalitas perjudian antara Indonesia dan Filipina. Filipina dipilih sebagai negara pembanding karena sebagai sesama negara di Asia Tenggara, Filipina memiliki pendekatan yang berbeda dengan Indonesia dalam mengatur sektor perjudian. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivitas perjudian di kedua negara tersebut relatif tinggi, namun terdapat perbedaan mengenai pendekatan pemerintah dalam merumuskan regulasi dalam menangani aktivitas perjudian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pola pengaturan yang diterapkan di kedua negara tersebut.

2. Metode

Metode Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2021: 35). Sifat dari penelitian hukum ini adalah preskriptif. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) yang dilakukan untuk membandingkan legalitas perjudian di Indonesia dan Filipina. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kepustakaan (*library research*).

3. Perbandingan Legalitas Perjudian di Indonesia dan Filipina

Legalitas merupakan keabsahan atau kesesuaian suatu tindakan atau keadaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (EasyLegal, n.d.). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), suatu tindakan dapat dinyatakan legal apabila sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, tindakan dilakukan dengan tanpa izin, melanggar ketentuan hukum, atau bertentangan dengan undang-undang merupakan tindakan ilegal (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2024). Dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*), merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan dan tidak dapat dijatuhi sanksi, tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu (Fitri et al., 2024: 204). Menurut Andi Hamzah, asas legalitas berfungsi untuk mencegah penguasa melakukan perbuatan sewenang-wenang kepada rakyat diluar undang-undang (Suherman, 2020: 137).

Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda dalam menangani perjudian. Praktik perjudian dapat dihukum apabila bertentangan dengan peraturan yang berlaku ataupun dilakukan tanpa izin. Sebaliknya, perjudian dinyatakan legal dan tidak dapat dihukum apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memiliki izin yang sah. Permainan judi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP 2020, merupakan segala bentuk permainan atau pertarungan yang hasilnya bergantung pada peruntungan, meskipun faktor keterampilan pemain dapat mempengaruhi hasilnya (Darmawan, 2023: 43). Sehingga, peserta yang tidak beruntung akan menanggung kerugian dengan melepaskan uang yang telah mereka pertaruhkan (Nurdiana et al., 2022: 105).

Indonesia dan Filipina, sebagai dua negara yang terletak di Asia Tenggara, memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur perjudian. Adapun perbandingan legalitas perjudian di Indonesia dan Filipina, sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan pengaturan perjudian di Indonesia dan Filipina

Aspek	Indonesia	Filipina
Legalitas Perjudian Berbasis Darat	Ilegal dan termasuk kejahatan.	Legal, selama kasino yang memiliki lisensi resmi dari otoritas yang berwenang di Filipina.
Legalitas Perjudian <i>Online</i>	Ilegal dan termasuk kejahatan.	Legal untuk warga negara asing dan perjudian <i>online</i> yang memiliki lisensi resmi, tetapi ilegal bagi warga Filipina. Namun, per 1 Januari 2025, akan sepenuhnya menjadi ilegal.
Pengaturan Perjudian dan/atau Perjudian <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP Lama ● Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP Baru ● Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE) ● UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ● PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian 	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Presidential Decree No. 1067-A</i> ● <i>Presidential Decree No. 1602, as amended by Republic Act No. 9287</i> ● <i>Executive Order No. 13</i> ● <i>Republic Act No. 9160, as amended by Republic Act No. 10927</i> ● <i>Republic Act No. 11590</i> ● <i>Republic Act No. 7922</i> ● <i>Republic Act No. 9490</i> ● <i>Republic Act No. 9728</i> ● <i>PAGCOR Charter (Presidential Decree No. 1869, as amended by Republic Act No. 9487)</i> ● Regulasi - regulasi yang dikeluarkan oleh PACGOR

Sumber: Olah data, 2025.

3.1. Legalitas Perjudian di Indonesia

Perjudian di Indonesia merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dan dikategorikan sebagai kejahatan. Di Indonesia, perjudian dilarang dengan diatur dalam Pasal 303 ayat (1) dan (2), serta Pasal 303 bis KUHP (Bunga, 2019: 30). Sedangkan dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang akan berlaku pada 2026, ketentuan sanksi terhadap pelanggaran perjudian diatur dalam Pasal 426 ayat (1) dan (2), serta Pasal 427 KUHP. Berikut merupakan ketentuan sanksi bagi setiap orang yang terbukti berpartisipasi dalam perjudian, antara lain:

Tabel 2. Sanksi terhadap pelanggaran Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP Lama & Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP Baru

Isi Ketentuan	Aturan dan Sanksi
Setiap orang dengan sengaja : 1. Menawarkan/ memberi kesempatan permainan judi dan menjadikannya mata pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan itu. 2. Menawarkan/ memberi kesempatan kepada khalayak umum, atau turut serta dalam perusahaan itu 3. Menjadikan turut serta dalam perjudian sebagai mata pencaharian.	Pasal 303 ayat (1) KUHP Lama: Penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp25 juta. Pasal 426 ayat (1) KUHP Baru: Penjara paling lama 9 tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar (kategori VI).
Perjudian dilakukan dalam menjalankan profesi atau pencariannya.	Pasal 303 ayat (2) KUHP Lama atau Pasal 426 (2) KUHP Baru: Pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan pencarian tersebut.
1. Menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303. 2. Ikut serta berjudi di jalan umum/ di pinggir jalan umum/ tempat umum tanpa izin.	Pasal 303 bis ayat (1) KUHP Lama: Penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp10 juta. Pasal 303 bis ayat (2) KUHP Lama: Residivis, dikenakan penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp15 juta. Pasal 427 KUHP Baru: Penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp50 juta (kategori III).

Tidak lagi mengatur mengenai residivis.

Sumber: Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP Lama & Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP Baru (Olah data, 2025)

Dalam KUHP Baru, sebagaimana diatur dalam Pasal 426 ayat (1) KUHP Baru, hukuman bagi pelaku perjudian mengalami perubahan, yaitu terdapat pengurangan ancaman pidana penjara dari paling lama 10 tahun menjadi paling lama 9 tahun, serta denda maksimum bagi pelaku perjudian meningkat dari denda paling banyak Rp 25 juta, menjadi denda paling banyak kategori VI atau Rp 2 miliar (berdasarkan Pasal 79 KUHP Baru). Sementara, dalam Pasal 427 KUHP Baru, terdapat perubahan ancaman pidana penjara yang sebelumnya pidana penjara paling lama 4 tahun dalam Pasal 303 bis KUHP Lama, kemudian dalam KUHP Baru berkurang menjadi paling lama 3 tahun. Sementara itu, denda yang semula paling banyak Rp 10 juta meningkat menjadi Rp 50 juta (kategori III, berdasarkan Pasal 79 KUHP Baru) (Kurniawan et al., 2024: 6653).

Di Indonesia, perjudian *online* adalah ilegal dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi orang yang terlibat dalam penyelenggaraan maupun partisipasi perjudian online. Larangan mengenai perjudian *online* di Indonesia diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (2) UU ITE melarang setiap orang untuk dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung muatan perjudian. Sementara itu, Pasal 45 ayat (3) UU ITE menetapkan ancaman pidana bagi individu yang melanggar Pasal 27 ayat (2) UU ITE, dengan sanksi pidana berupa penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 10 miliar rupiah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, menegaskan perjudian adalah bentuk kejahatan, aturan ini bertujuan untuk menghapus praktik perjudian di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 7 Tahun 1974, yang mengatur tentang penghapusan izin perjudian dalam KUHP serta mencabut peraturan-peraturan pemerintah yang bertentangan dengan ketentuan tersebut (Aidah & Pratama, 2022: 2182). Dalam bagian penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, disebutkan mengenai bentuk-bentuk perjudian yang dilarang, sebagai berikut:

- a. Perjudian di kasino: *Roulette; Blackjack; Baccarat; Creps; Keno; Tombola; Super Ping-pong; Lotto Fair; Satan; Paykyu; Slot machine (Jackpot); Ji Si Kie; Big Six Wheel; Chuc a Luck; Lempar paser (Paseran); Pachinko; Poker; Twenty One; Hwa-Hwe; dan Kiu-kiu.*
- b. Perjudian di tempat-tempat keramaian: Lempar Paser; Lempar Gelang; Lempar Uang (*Coin*); Kim; Pancingan; Menembak sasaran yang tidak berputar; Lempar bola; Adu ayam; Adu sapi; Adu kerbau; Adu

domba/kambing; Pacu kuda; Karapan sapi; Pacu anjing; *Hailai*; Mayong/Macak; dan Erek-erek.

- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain (kebiasan masyarakat): Adu Ayam; Adu Sapi; Adu Kerbau; Karapan Sapi; Pacuan Kuda; Adu Domba/Kambing.

Di Indonesia, terdapat lembaga yang berwenang dalam penindakan terhadap situs web, aplikasi, serta platform digital yang digunakan sebagai sarana perjudian *online*, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika Digital (Kemkomdigi) dengan berkolaborasi dengan lintas sektor seperti Pemerintah dan pihak swasta (Rusito, 2024: 221). Dalam upaya penanganan perjudian *online*, Kemkomdigi juga mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk melakukan moderasi konten serta menutup akses terhadap informasi yang bermuatan perjudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2c) UU ITE (Ramadoni et al., 2023: 55).

3.2. Legalitas Perjudian di Filipina

Perjudian berbasis darat (*land-based casinos*) di Filipina adalah legal apabila dioperasikan oleh entitas yang memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang di Filipina, sebagaimana diatur dalam *Presidential Decree No. 1067-A* yang disahkan pada tahun 1976. Aturan ini menjadi dasar hukum legalisasi kasino, serta dasar pendirian *Philippine Amusement and Gaming Corporation* (PAGCOR), yaitu sebuah perusahaan milik negara yang bertanggung jawab atas regulasi dan operasional perjudian legal di Filipina (Banko Sentral ng Pilipinas (BSP), 2018: 2).

Berdasarkan *Presidential Decree No. 1067-A*, tujuan legalisasi perjudian di Filipina adalah untuk mencegah penyebaran kasino ilegal tanpa pengawasan pemerintah. Disamping itu, sebagaimana diatur dalam *Section 1 Presidential Decree No. 1067-A*, adapun tujuan dilakukannya sentralisasi dan integrasi kewenangan dalam mengoperasikan dan menyelenggarakan perjudian yang dikendalikan, dikelola, dan diawasi oleh pemerintah oleh pemerintah Filipina, yaitu sebagai sumber pendapatan tambahan, mendukung industri pariwisata dengan menyediakan hiburan legal bagi wisatawan, serta meminimalisir atau jika memungkinkan, menghapus praktik buruk dari penyimpangan, dan korupsi yang sering terjadi dalam penyelenggaraan kasino.

Pendapatan perjudian di Filipina dialokasikan untuk berbagai keperluan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan *Presidential Decree No. 1869*, sebagian dari pendapatan disetor ke *Bureau of Internal Revenue* (BIR) sebagai *franchise tax* dan *National Treasury* sebagai pendapatan wajib pemerintah, serta disalurkan untuk *Host Cities Share* bagi kota yang menjadi tuan rumah kasino. Selain itu, berdasarkan *Republic Act No. 6847*, sebagian pendapatan perjudian tersebut juga disalurkan ke *Socio-Civic Project Fund* di bawah *Office of the President* untuk mendukung berbagai program sosial dan pembangunan. Di sektor olahraga, berdasarkan *Republic Act No. 10699*, pendapatan perjudian juga diberikan kepada *Philippine Sports Commission* untuk pengembangan olahraga, serta penyediaan insentif bagi atlet dan pelatih berprestasi melalui *Sports Benefits and Incentives Act*.

Disamping itu, dana juga diberikan untuk *Board of Claims* sebagai kompensasi korban salah penahanan dan penuntutan, sebagaimana diatur dalam *Republic Act No. 7309 (PACGOR, 2023: 11)*.

Pada tahun 2017, *Executive Order No. 13* disahkan. Aturan ini mengatur mengenai penguatan pemberantasan perjudian ilegal di Filipina dengan melibatkan lembaga penegak hukum, sebagaimana diatur dalam *Section 1 Executive Order No. 13*, yaitu *Philippine National Police (PNP)*, *National Bureau of Investigation (NBI)* dengan bekerja sama dengan instansi terkait, seperti *Department of Justice (DOJ)*, *Department of the Interior and Local Government (DILG)*, dan *Department of Information and Communications Technology (DICT)*.

Dalam *Section 2 Executive Order No. 13*, dijelaskan mengenai definisi perjudian ilegal di Filipina, yaitu segala bentuk permainan atau skema taruhan, baik yang bergantung pada keberuntungan, keterampilan, atau kombinasi keduanya, dengan mempertaruhkan uang, barang berharga, atau bentuk nilai lainnya, tanpa izin dari otoritas berwenang atau melanggar ketentuan lisensi yang ditetapkan. Disamping itu, perjudian yang dilakukan di luar yurisdiksi pemberi lisensi juga dianggap ilegal dan dikenakan sanksi hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka segala aktivitas perjudian yang beroperasi di Filipina tanpa memiliki lisensi resmi dari otoritas yang berwenang adalah ilegal dan dapat dikenai sanksi pidana. Pengaturan mengenai sanksi terhadap perjudian ilegal diatur lebih lanjut dalam *Republic Act No. 9287* pada tahun 2004, mengamandemen *Presidential Decree No. 1602*. Aturan *Republic Act No. 9287* memperjelas definisi bentuk-bentuk permainan judi yang dilarang di Filipina, yaitu *Illegal Numbers Game*, *Jueteng*, *Masiao*, *Last Two*, serta memperberat hukuman terhadap individu yang terlibat dalam perjudian ilegal (Mabanta et al., 2024: 2).

Dalam *Section 2(a) Republic Act No. 9287*, dijelaskan mengenai definisi permainan angka ilegal (*illegal numbers game*), yaitu segala bentuk aktivitas perjudian ilegal yang menggunakan angka atau kombinasi angka sebagai faktor dalam penentuan pemenang atau pemberian hadiah *jackpot*. Adapun bunyi ketentuannya, sebagai berikut:

“Sec. 2. Definition of Terms. - As used in this Act, the following terms shall mean:

- a) Illegal Numbers Game. - Any form illegal gambling activity which uses numbers or combinations thereof as factors in giving out jackpots.*
- b) “*

Berikut merupakan sanksi pidana terhadap setiap orang yang terbukti berpartisipasi dalam permainan judi angka ilegal (*illegal numbers game*), sebagaimana diatur dalam *Section 3 Republic Act No. 9287* tersebut, sebagai berikut:

Tabel 3. Sanksi pidana terhadap pelanggaran *Section 3 Republic Act No. 9287*

	Peran dalam Judi Angka Ilegal	Pidana Penjara
--	--------------------------------------	-----------------------

a.	Pemasang taruhan (<i>Bettor</i>)	30 hari – 90 hari
b.	Personel atau staf dalam operasi judi ilegal	6 tahun 1 hari – 8 tahun
c.	Pemilik kendaraan, rumah, bangunan, atau tanah yang digunakan untuk operasi judi ilegal	6 tahun 1 hari – 8 tahun
d.	<i>Collector</i> atau agen	8 tahun 1 hari – 10 tahun
e.	Koordinator, <i>controller</i> , atau <i>supervisor</i>	10 tahun 1 hari – 12 tahun
f.	Pemelihara (<i>maintainer</i>), manajer, atau operator	12 tahun 1 hari – 14 tahun
g.	Penyandang dana (<i>financier</i>) atau <i>capitalist</i>	11 tahun 1 hari – 14 tahun
h.	Pelindung atau pembeking (<i>Protector/Coddler</i>)	16 tahun 1 hari – 20 tahun

Sumber: Section 3 Republic Act No. 9287 (Olah data, 2025).

Dalam Section 5 Republic Act No. 9287, diatur mengenai sanksi tambahan bagi pegawai negeri atau pejabat publik terlibat permainan angka ilegal (*illegal numbers game*), maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi, sebagai berikut:

Tabel 4. Sanksi terhadap pelanggaran Section 5 Republic Act No. 9287

Ketentuan	Sanksi
<ul style="list-style-type: none"> Jika pegawai pemerintah atau pejabat publik (baik dipilih ataupun diangkat) berperan sebagai kolektor, agen, koordinator, pengendali, pengawas, pemelihara, pengelola, operator, pemodal, atau kapitalis dalam permainan angka ilegal. Jika pejabat daerah mengetahui, tetapi tidak menghentikan atau membiarkan adanya permainan angka ilegal berlangsung di yurisdiksinya. 	Ancaman pidana penjara 12 tahun 1 hari – 20 tahun dan denda ₱3.000.000 – ₱5.000.000, serta sanksi tambahan berupa diskualifikasi absolut & permanen dari jabatan publik.
Jika penegak hukum tidak menangkap pelaku permainan angka ilegal.	Sanksi administratif: <i>Skorsing</i> atau pemberhentian dari jabatan sesuai keputusan otoritas berwenang.

Sumber: Section 5 Republic Act No. 9287 (Olah data, 2025).

Dalam Section 6 Republic Act No. 9287, diatur mengenai pertanggungjawaban hukum bagi setiap orang tua, wali, atau individu yang memiliki kewenangan moral atau kedudukan lebih tinggi, yang dengan cara apa pun mendorong atau menyebabkan anak di bawah umur, tanggungan, atau orang yang tidak cakap hukum melakukan salah satu tindak pidana

perjudian dalam aturan *Republic Act No. 9287*, dikenakan penjara pidana 6 bulan - 1 tahun atau denda ₱100-400 juta, serta kehilangan hak perwalian.

Untuk mencegah praktik pencucian uang dalam industri perjudian, pemerintah Filipina mengeluarkan *Republic Act No. 10927* tahun 2017, yang mengamandemen *Republic Act No. 9160 (Anti-Money Laundering Act of 2001)*, mengatur mengenai kasino atau operator perjudian lainnya di Filipina diwajibkan mematuhi peraturan terkait pencucian uang (*Anti-Money Laundering*), seperti sebagaimana diatur dalam *Section 9 Republic Act No. 9160*, yaitu mencatat identitas asli klien berdasarkan dokumen resmi, menyimpan catatan transaksi pelanggan selama 5 tahun sejak tanggal transaksi pertama, serta melaporkan transaksi perjudian kepada *Anti-Money Laundering Council (AMLC)*.

Perjudian *online* di Filipina, sebagaimana diumumkan oleh Presiden Ferdinand Marcos Jr. dalam *State of the Nation Address (SONA)* pada 22 Juli 2024, akan dinyatakan ilegal secara keseluruhan. Larangan ini direncanakan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2025, setelah dipublikasikan dalam lembaran negara (*official gazette*) atau setidaknya satu surat kabar dengan peredaran umum (*newspaper of general circulation*) (Mabanta et al., 2024: 2). Larangan ini diberlakukan karena meningkatnya permasalahan hukum, sosial, serta dugaan keterlibatan industri ini dalam berbagai kejahatan, termasuk penipuan keuangan, pencucian uang, prostitusi, perdagangan manusia, penculikan, penyiksaan, hingga pembunuhan (Esguerra, 2024). Implementasi larangan ini akan ditetapkan dalam *Senate Bill No. 2752 (Anti-POGO Act)*, serta *Senate Bill No. 1281 (Anti-Online Gambling Act)*, tetapi saat ini masih dalam proses pembahasan (Gibbs, 2024).

Sebelumnya, larangan perjudian *online* hanya berlaku bagi warga Filipina, serta individu dari negara yang melarang partisipasi dalam perjudian *online* (National Tax Research Center, 2019: 2). Namun, perjudian *online* adalah legal bagi individu asing yang secara fisik berada di yurisdiksi dengan lisensi sah, serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam *Section 4(e) Rules and Regulations for Philippine Offshore Gaming*, sebagai berikut:

- a. *Offshore individuals*, yaitu individu yang secara fisik berada di luar wilayah Filipina. Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi warga Filipina, meskipun sedang berada di luar negeri maupun individu dari negara yang melarang warganya berjudi *online*.
- b. Warga negara asing yang sedang berada di Filipina tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam aktivitas perjudian *online* berlisensi.
- c. Berusia minimal 21 tahun atau sesuai dengan batas usia legal yang berlaku di negara tempat pemain berdomisili.
- d. Terdaftar secara resmi sebagai pemain.

Perjudian *online* di Filipina diatur melalui skema perizinan *Philippine Offshore Gaming Operators (POGO)* yang diterbitkan oleh PAGCOR. Skema POGO memungkinkan perusahaan berbasis di Filipina untuk menyediakan layanan perjudian *online* ke pasar luar negeri. Dalam *Section 3 Executive Order No. 13*, dijelaskan mengenai klarifikasi perjudian *online*, yaitu operator

perjudian *online* berlisensi Filipina tersebut tidak diperbolehkan menerima pemain dari luar yurisdiksi lisensinya. Perjudian *online* atau *offshore gaming* di Filipina lebih lanjut diatur melalui regulasi yang diterbitkan oleh PAGCOR, yaitu *Internet Gaming Licensing Regulations* (IGLR), yaitu ketentuan mengenai perizinan, pendaftaran, dan akreditasi untuk pemegang lisensi perjudian internet dan penyedia layanan yang menyediakan komponen dalam perjudian *online* (Mabanta et al., 2024: 2).

Republic Act No. 11590 disahkan pada 2021, mengatur mengenai pajak untuk operasi perjudian *online* terlisensi di Filipina, termasuk kewajiban pajak penghasilan bagi pekerja asing di sektor tersebut, pengenaan pajak atas pendapatan perjudian, dan pajak atas transaksi barang dan jasa yang terkait. Dalam *Section 9 Republic Act No. 11590*, dijelaskan bahwa 60% dari pendapatan pajak perjudian akan dialokasikan untuk pelaksanaan *Universal Health Care Act*, 20% untuk mendukung program peningkatan fasilitas kesehatan dan 20% untuk pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). (Martinez, n.d.)

Adapun beberapa badan yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi perjudian di Filipina antara lain, *Philippine Amusement and Gaming Corporation* (PAGCOR). PAGCOR didirikan melalui *Presidential Decree No. 1067-A* pada tahun 1975, merupakan sebuah perusahaan milik negara yang bertanggung jawab atas pembentukan regulasi, melakukan pengawasan operasional kasino di Filipina, mengeluarkan lisensi perjudian, menghasilkan pendapatan bagi program sosial-kemasyarakatan dan pembangunan nasional pemerintah Filipina, serta membantu mempromosikan industri pariwisata Filipina (Gore, 2023: 14).

Pada tahun 1983, *PAGCOR Charter (Presidential Decree No. 1869, as amended by Republic Act No. 9487)* disahkan untuk memperkuat kewenangan PAGCOR dan mengatur pedoman pemberian lisensi. Aturan ini juga menegaskan bahwa semua operasional dan regulasi terkait perjudian akan berada di bawah kendali PAGCOR (Ingles & Michael, 2023). Dalam menjalankan fungsi regulator, PAGCOR mengeluarkan berbagai regulasi sebagai pedoman dan mengatur perjudian di Filipina, seperti *Supplier Regulatory Manual* untuk mengatur semua peralatan game dan perlengkapan permainan yang dipasok dan dipelihara di Filipina, *Gaming Employment License Manual* untuk mengatur mengenai izin seseorang untuk dipekerjakan sebagai karyawan perjudian di Filipina, *Casino Regulatory Manual for Entertainment City Licensees* untuk mengatur perjudian berbasis darat di resor terintegrasi di kompleks Entertainment City di Manila, dan *Casino Regulatory Manual for Clark Licensees* untuk mengatur kasino di Clark, Pampanga, dan lain-lain (PAGCOR, n.d.).

Selain PAGCOR, terdapat otoritas lain yang memiliki kewenangan untuk memberikan lisensi kepada perusahaan perjudian yang beroperasi di “zona ekonomi khusus” di Filipina. Namun, aktivitas dan peralatan perjudian (termasuk server komputer) umumnya dibatasi dalam zona ekonomi tersebut. Otoritas-otoritas tersebut antara lain, *Cagayan Special Economic Zone*

Authority (CEZA), *Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority* (APECO), dan *Authority of the Freeport Area of Bataan* (AFAB) (Mabanta et al., 2024: 3). Disamping itu, terdapat pula, beberapa badan lain dalam industri perjudian di Filipina meliputi, *Philippine Racing Commission* (PHILRACOM) yang mengawasi balapan kuda (*horse racing*), *Games and Amusements Board* (GAB) mengawasi permainan olahraga berbayar (*sport betting*), serta *Philippine Charity Sweepstakes Office* (PCSO) mengelola lotere dan permainan undian (Respicio.ph, 2025).

4. Kesimpulan

Indonesia dan Filipina memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur perjudian. Indonesia menerapkan pendekatan kriminalisasi penuh terhadap segala bentuk perjudian, baik berbasis darat maupun *online*, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian. Sementara itu, di Filipina, perjudian berbasis darat adalah legal selama dioperasikan oleh entitas yang memiliki lisensi resmi, sedangkan perjudian *online* hanya legal bagi warga negara asing dan entitas perjudian online berlisensi, tetapi tetap ilegal bagi warga negara Filipina. Namun, mulai 1 Januari 2025, perjudian online di Filipina direncanakan untuk sepenuhnya ilegal, setelah dipublikasikan dalam *official gazette* atau setidaknya satu surat kabar dengan peredaran umum (*newspaper of general circulation*).

References

Journals:

- Abeth, H. J., Esti Royani, & Salmonius. (2021). Penegakkan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian di Masyarakat. *Collegium Studiosum Journal*, 4(2), 88–97. <https://doi.org/10.56301/csj.v4i2.483>
- Aidah, K. N., & Pratama, B. (2022). The Comparative of Regulations About Online Gambling Between Indonesia, Malaysia, Singapore, and United Kingdom. In *3rd Asia Pacific International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*.
- Bunga, D. (2019). Kebijakan Formulasi Judi Online Dalam Hukum Indonesia. *Vyavahara Duta*, 14(1), 21. <https://doi.org/10.25078/vd.v14i1.1100>
- Darmawan, D. (2023). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Online Taruhan Sepak Bola. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 41–50.
- Fitri, F. A., Muftia, N., Trilia, I., Munthe, A. H., & Ramlan. (2024). Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 202–209.
- Kurniawan, E., Hakim, L., & Riyadi, S. (2024). Gacor Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Judi Online Kasus Judi Slot. *Journal Syntax Idea*, 6(11).
- Lewiandy, Gunadi, A., & Putra, E. T. (2024). The Prohibition of Online Gambling in

- Indonesia: a Law and Economic Analysis. *Indonesia Law Review*, 14(2), 1–22. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v14n2.1>
- National Tax Research Center. (2019). Profile and Taxation of Philippine Offshore Gaming Operations. *NTRC Tax Research Journal*, XXXI(3).
- Nurdiana, M., Aisyah, N., & Nabilah, I. S. (2022). Fenomena Judi Online di Daerah Jakarta Selatan. *Jurnal Perspektif*, 2(1), 105–110.
- Prasetyawati, Y. R., & Lamoste, A. D. (2021). The Relationship of Consumer Attitude and Government Regulations Towards Online Gambling Behavior in The Philippines. *Communicare: Journal of Communication Studies*, 8(2), 146. <https://doi.org/10.37535/101008220215>
- Ramadoni, S. R., Gegana, R. P., & Sanata, K. (2023). Sejarah Undang-Undang ITE: Periodisasi Regulasi Peran Negara dalam Ruang Digital. *Langgong: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 41–58.
- Rusito, M. Y. I. A. A. (2024). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Di Indonesia: Pencegahan dan Pemberantasan. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 10(4), 215–229.
- Ruslan, I., Badi'ah, S., & Listiana, L. (2021). Fenomena Judi Sabung Ayam Masyarakat Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 16(1), 23–48. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v16i1.8812>
- Setiawati, S., Daulat, P. A. S., Sunarto, & Dewi, S. (2022). The Urgency of Special Regulations for online Gambling in Indonesia. *International Journal of Arts and Social Science*, 5(7), 108–115.
- Suherman, A. (2020). Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(1), 133. <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.133>

Books:

- Gore, A. (2023). *An Assessment of AML Risks Linked to Accepting Crypto-Payments In The Gambling Sector (A Regulator's Guide)* (Issue May). Las Vegas: The International Center for Gaming Regulation.
- Gore, A., Kennedy, L., Southern, N., & Uhm, D. van. (2022). *Asian Roulette: Criminogenic Casinos And Illicit Trade In Environmental Commodities In South East Asia* (Issue July). Switzerland: Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
- Ingles, D., & Michael, I. (2023). *Sports Law in the Philippines*. Kluwer Law International.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group.

Report:

- PACGOR. (2023). *Annual Report 2023 Philippine Amusement and Gaming Corporation*. Philippine: PACGOR.

<https://www.pagcor.ph/annual-reports/pagcor-annual-report-2023.pdf>

Internet:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). *KBBI Daring Edisi III*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/> (diakses pada 11 Maret 2025).

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). (2018). *Thirty-First Meeting of the IMF Committee on Balance of Payments Statistics: Estimating Casino Revenues and Transfers for the Philippine Balance of Payments Statistics*. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2018/pdf/18-23.pdf> (diakses pada 10 Maret 2025).

EasyLegal. (n.d.). *Kamus Legal*. Easylegal.Id. <https://easylegal.id/glossary/legalitas-adalah/#:~:text=Dalam%20konteks%20hukum%20legalitas%20mengacu%20pada%20keabsahan%20dan,yang%20telah%20ditetapkan%20oleh%20pemerintah%20atau%20otoritas%20berwenang> (diakses pada 11 Maret 2025).

Esguerra, D. J. (2024). *PH to be POGO-Free by 2025, Gov't Bracing For Influx Of Rogue Ops*. Philippine News Agency. <https://www.pna.gov.ph/index.php/articles/1239729> (diakses pada 10 Maret 2025).

Gibbs, E. (2024). *Comprehensive POGOs Ban Takes Effect in The Philippines*. Next.io. <https://next.io/news/regulation/comprehensive-pogos-ban-takes-effect/> (diakses pada 10 Maret 2025).

Mabanta, R., & B. S., & Angeles, D. L. (2024). *Legal 500 Country Comparative Guides 2024: Philippines Gambling Law*. Legal 500. <https://www.legal500.com/guides/chapter/philippines-gambling-law/?export-pdf> (diakses pada 12 Maret 2025).

Martinez, P. (n.d.). *Tax Treatment of Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs)*. Platon Martinez Flores San Pedro & Leaño Law Offices. <https://platonmartinez.com/articles/tax-treatment-of-philippine-offshore-gaming-operators-pogos> (diakses pada 10 Maret 2025).

PACGOR. (2025). *PACGOR Revenues Hit New Record High Of PHP112 Billion In 2024*. PACGOR.Ph. <https://www.pagcor.ph/press-releases/pagcor-revenues-hit-new-record-high-of-php112-billion-in-2024.php> (diakses pada 12 Maret 2025).

PACGOR. (n.d.). *Regulatory PACGOR: Licensed Casinos*. <https://www.pagcor.ph/regulatory/casinos.php> (diakses pada 12 Maret 2025)

Philippines Anti-Money Laundering Council. (2020). *Understanding the Internet-Based Casino Sector in the Philippines: A Risk Assessment Republic of the Philippines: March 2020*. Republic of the Philippines: Anti-Money Laundering Council (AMLC). <http://www.amlc.gov.ph/images/PDFs/AMLC%20RISK%20ASSESSMENT%20ON%20INTERNET-BASED%20CASINO%20SECTOR%20IN%20THE%20PHILIPPINES.doc.pdf> (diakses pada 12 Maret 2025).

Respicio.ph. (2025). *Penalties for Illegal Gambling in the Philippines: A Comprehensive Overview*. Respicio & Co. Law Firm. <https://www.respicio.ph/commentaries/penalties-for-illegal-gambling-in-the-philippines> (diakses pada 10 Maret 2025).

Wisnubroto, K. (2024). *Komitmen Kuat Kemenkomdigi Berangus Judi Online*. Indonesia.Go.Id. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8781/komitmen-kuat-kemenkomdigi-berangus-judi-online?lang=1> (diakses pada 11 Maret 2025).

Legal Documents:

Peraturan Indonesia:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Peraturan Filipina:

Casino Regulatory Manual for Entertainment City Licensees

Casino Regulatory Manual for Clark Licensees

Executive Order No. 13 An Act Strengthening The Fight Against Illegal Gambling and Clarifying The Jurisdiction and Authority of Concerned Agencies In The Regulation And Licensing of Gambling and Online Gaming Facilities, and For Other Purposes.

Gaming Employment License Manual

Presidential Decree No. 1067-A An Act Creating The Philippine Amusements and Gaming Corporation, Defining Its Powers and Functions, Providing Funds Therefor, and For Other Purposes.

Republic Act No. 10699 An Act Expanding The Coverage of Incentives Granted To National Athletes and Coaches, Appropriating Funds Therefor, Repealing For The Purpose Republic Act No. 9064, Also Known As The "National Athletes, Coaches and Trainers Benefits and Incentives Act of 2001" or "Sports Benefits and Incentives Act of 2001"

Republic Act No. 10927 An Act designating casinos as covered persons under Republic Act no. 9160, otherwise known as the "Anti-Money Laundering Act of 2001.

Republic Act No. 11590 An Act Taxing Philippine Offshore Gaming Operations, Amending For The Purpose Sections 22, 25, 27, 106, 108, and Adding New Sections 125-A and New Sections 125-A and 228(G) of The National Internal Revenue Code

of 1997, As Amended, and For Other Purposes.

Republic Act No. 6847 An Act Creating and Establishing The Philippine Sports Commission, Defining Its Powers, Functions and Responsibilities, Appropriating Funds Therefor, and For Other Purposes

Republic Act No. 7309 An Act Creating A Board of Claims Under The Department of Justice For Victims of Unjust Imprisonment or Detention and Victims of Violent Crimes and For Other Purposes

Republic Act No. 7922 An Act Establishing A Special Economic Zone and Free Port In The Municipality of Santa Ana and The Neighboring Islands In The Municipality of Aparri, Province of Cagayan, Providing Funds Therefor, and For Other Purposes

Republic Act No. 9287 An Act Increasing The Penalties For Illegal Numbers Games, Amending Certain Provisions of Presidential Decree No. 1602, and For Other Purposes.

Republic Act No. 9487 An Act Further Amending Presidential Decree No. 1869, Otherwise Known As Pagcor Charter

Republic Act No. 9490 An Act Establishing The Aurora Special Economic Zone In The Province of Aurora, Creating For The Purpose The Aurora Special Economic Zone Authority, Appropriating Funds Therefor and For Other Purposes

Republic Act No. 9728 An Act Converting The Bataan Economic Zone Located In The Municipality of Mariveles, Province of Bataan, Into The Freeport Area of Bataan (FAB), Creating For This Purpose The Authority of The Freeport Area of Bataan (AFAB). Appropriating Funds Therefor and For Other Purposes

Supplier Regulatory Manual